

Transformasi Identitas Akademisi Menjadi Politisi: Analisis Psikologi Politik Nelson Pomalingo di Gorontalo

Bala Bakri¹, Muhammad Daud², Hilwa Anwar²

¹Universitas Ichsan Sidenreng Rappang, Indonesia

²Universitas Negeri Makassar, Indonesia

¹bala.insetter@gmail.com

Abstract

The transition of academics into electoral politics is often normatively interpreted either as an expansion of public service or as a threat to academic independence. Such a dichotomy overlooks the psychological mechanisms that connect professional identity, political ambition, and available political opportunities. This study aims to explain the process and motives underlying Nelson Pomalingo's transition from professor and university rector to political party cadre and elected regional head in Gorontalo, Indonesia. A qualitative single-case design with narrative analysis was employed. Data were collected through in-depth interviews conducted in 2022 and document review. The analysis reconstructed the chronology of the transition, identified recurring motives, and interpreted them using achievement, power, and affiliation needs, political efficacy, moral identity, and social capital. The findings indicate that the transition was not an abrupt career change. It developed through an interaction between academic and managerial achievements, confidence in decision-making capacity, moral responsibility for regional development, adverse political experiences, party recruitment, and accumulated organizational networks. Achievement and affiliation were subsequently directed toward the pursuit of legitimate political influence. The narrative of public service gave moral coherence to this pursuit, while social capital and party access made candidacy feasible. This case shows that an academic's political transformation is best understood as a gradual reconstruction of professional identity within a political opportunity structure, rather than as the effect of a single motive. The study contributes an integrative political-psychological explanation while remaining limited to one retrospective account.

Keywords: *Academic-Politician; Narrative Identity; Political Ambition; Political Psychology; Social Capital*

Abstrak

Peralihan akademisi ke politik elektoral sering dinilai secara dikotomis sebagai perluasan pengabdian publik atau ancaman terhadap independensi akademik. Dikotomi tersebut mengabaikan mekanisme psikologis yang menghubungkan identitas profesi, ambisi politik, dan peluang politik. Penelitian ini bertujuan menjelaskan proses dan motif yang melandasi transformasi Nelson Pomalingo dari profesor dan rektor menjadi kader partai politik serta kepala daerah terpilih di Gorontalo. Penelitian menggunakan desain kualitatif studi kasus tunggal dengan analisis naratif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam pada 2022 dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan dengan merekonstruksi kronologi peralihan, mengidentifikasi motif berulang, serta menafsirkannya melalui kebutuhan berprestasi, berkuasa, dan berafiliasi, efikasi politik, identitas moral, dan modal sosial. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa transformasi tidak berlangsung sebagai perpindahan profesi yang tiba-tiba. Proses tersebut dibentuk oleh interaksi antara capaian akademik dan manajerial, keyakinan atas kapasitas pengambilan keputusan, tanggung jawab moral terhadap pembangunan daerah, pengalaman politik yang merugikan, rekrutmen partai, dan akumulasi jejaring organisasi. Kebutuhan berprestasi dan berafiliasi kemudian diarahkan pada pencarian pengaruh politik yang sah. Narasi pengabdian publik memberi koherensi moral terhadap orientasi kekuasaan, sedangkan modal sosial dan akses partai membuat pencalonan menjadi layak diperjuangkan. Temuan menegaskan bahwa transformasi politik akademisi lebih tepat dipahami sebagai rekonstruksi identitas profesi secara bertahap dalam struktur peluang politik, bukan sebagai akibat satu motif tunggal. Kontribusi penelitian terletak pada penjelasan psikologi politik yang integratif, dengan keterbatasan berupa penggunaan satu kasus dan ingatan retrospektif informan.

Kata Kunci: Akademisi-Politisi; Ambisi Politik; Identitas Naratif; Modal Sosial; Psikologi Politik

Pendahuluan

Keterlibatan akademisi dalam politik elektoral menghadirkan pertentangan normative, yaitu antara pengetahuan, pengalaman mengelola institusi, dan orientasi pada bukti dapat memperkuat mutu kebijakan. Pada sisi lain, kompetisi partai menuntut loyalitas, kompromi, mobilisasi dukungan, dan pengelolaan citra yang berpotensi menggeser independensi akademik. Karena itu, peralihan akademisi menjadi politisi tidak cukup dijelaskan sebagai pergantian pekerjaan. Peralihan tersebut merupakan proses rekonstruksi identitas, motif, dan cara individu memaknai pengabdian publik.

Dari sudut identitas naratif, perubahan tersebut berlangsung ketika pengalaman masa lalu dipilih dan dirangkai menjadi kisah diri yang menjelaskan siapa seseorang, nilai apa yang dipertahankan, dan mengapa peran politik dianggap sebagai kelanjutan yang masuk akal dari karier akademik (McAdams & McLean, 2013; Riessman, 2008). Fenomena akademisi-politisi telah lama hadir di Indonesia melalui figur seperti Amien Rais, Hidayat Nur Wahid, Irwan Prayitno, dan Nurdin Abdullah. Kehadiran figur tersebut menunjukkan bahwa kompetensi profesional dapat menjadi sumber rekrutmen politik. Namun, capaian akademik tidak otomatis menghasilkan pencalonan.

Kajian mengenai kemunculan kandidat menunjukkan bahwa keputusan untuk mencalonkan diri dibentuk oleh nilai pribadi, karakter psikologis, penilaian atas kualifikasi diri, dorongan lingkungan, rekrutmen partai, dan persepsi bahwa peluang kemenangan tersedia (Blais et al., 2019; Dynes et al., 2024; Fox & Lawless, 2014; Weinberg, 2021). Dengan demikian, ambisi politik tidak identik dengan keinginan memperoleh jabatan semata, tetapi terbentuk melalui hubungan antara disposisi individu dan struktur kesempatan. Salah satu fungsi utama akademisi sebagaimana yang pernah dilontarkan oleh Edward Said adalah sebagai pengganggu status quo yang tidak terafiliasi kepada apapun kecuali kebenaran dan hati nurani.

Lazimnya mereka berperan dengan menggunakan mimbar akademik dan publikasi karya ilmiah. Ilmuwan politik dari *UC Berkeley*, Aaron Wildavsky juga pernah melontarkan gagasan bahwa tugas utama seorang ilmuwan dan ahli kebijakan publik adalah menyampaikan kebenaran kepada kekuasaan. Perspektif psikologi politik diperlukan karena keputusan memasuki arena elektoral melibatkan keyakinan, emosi, nilai, motivasi, identitas, dan persepsi risiko. Kebutuhan berprestasi mendorong pencarian standar keberhasilan yang

lebih tinggi, kebutuhan berkuasa berkaitan dengan keinginan memengaruhi keputusan kolektif, sedangkan kebutuhan berafiliasi mendorong pembentukan dan pemeliharaan relasi sosial (McClelland, 1987; Mikhriani, 2008). Ketiga kebutuhan tersebut tidak harus bekerja secara terpisah. Dalam karier politik, prestasi profesional dapat meningkatkan efikasi politik, jejaring afiliasi dapat berubah menjadi sumber dukungan, dan kebutuhan berpengaruh dapat memperoleh pembenaran melalui orientasi pelayanan publik.

Penekanan pada konteks juga penting karena konsep yang lahir dari demokrasi Barat belum tentu bekerja dengan cara yang sama di Asia Tenggara; psikologi politik kawasan perlu membaca hubungan individu, jaringan sosial, nilai lokal, dan institusi secara bersamaan (Mashuri et al., 2022). Efikasi politik merujuk pada keyakinan bahwa kapasitas pribadi memadai untuk memahami dan memengaruhi proses politik. Penilaian positif terhadap kualifikasi diri merupakan salah satu jembatan psikologis dari pengalaman profesional menuju ambisi pencalonan (Fox & Lawless, 2014; Dynes et al., 2024).

Pada saat yang sama, nilai dasar dan identitas moral menentukan tujuan yang dianggap pantas diperjuangkan melalui jabatan politik (Han et al., 2021; Weinberg, 2021). Politik kemudian dipahami bukan hanya sebagai perebutan sumber daya, tetapi sebagai arena untuk menerjemahkan konsepsi diri ke dalam keputusan publik. Modal sosial melengkapi penjelasan tersebut. Jejaring, kepercayaan, dan norma timbal balik dapat menyediakan informasi, legitimasi, serta kapasitas mobilisasi (Portes, 1998; Putnam, 1995). Namun, modal sosial tidak selalu menghasilkan manfaat demokratis. Jejaring juga dapat menjadi eksklusif dan dipertukarkan secara instrumental. Karena itu, fungsi modal sosial perlu dibaca bersama motif aktor dan struktur rekrutmen partai. Dalam sistem pilkada langsung, rasa mampu belum memadai tanpa akses pencalonan, basis dukungan, dan kendaraan organisasi. Sejumlah penelitian telah menguraikan ambisi politik, kepercayaan diri kandidat, nilai pribadi, dan rekrutmen politik (Ammassari et al., 2023; Dynes et al., 2024; Fox & Lawless, 2024; Weinberg, 2021). Akan tetapi, kajian tersebut umumnya menggunakan survei kandidat atau calon potensial dan banyak berkembang dalam demokrasi Barat. Penjelasan mengenai bagaimana seorang akademisi senior di tingkat lokal Indonesia menarasikan perubahan identitas, menggabungkan motif pengabdian dan kekuasaan, serta mengonversi jejaring akademik menjadi sumber daya elektoral masih terbatas.

Kesenjangan ini penting karena politik lokal Indonesia ditandai oleh kuatnya peran jejaring personal, organisasi sosial, dan rekrutmen partai. Kasus Nelson Pomalingo relevan untuk mengisi kesenjangan tersebut. Karier akademik telah mencapai jabatan profesor dan rektor, tetapi status pegawai negeri sipil dilepaskan sebelum usia pensiun untuk memasuki politik elektoral. Pilihan itu didahului pengalaman pencalonan melalui jalur perseorangan, keterlibatan dalam pembentukan Provinsi Gorontalo, kepemimpinan organisasi sosial kemasyarakatan, dan proses rekrutmen partai.

Kasus ini menyediakan ruang untuk menelaah bagaimana capaian akademik, pengalaman politik, tanggung jawab moral, dan jejaring sosial disusun menjadi alasan yang koheren bagi transformasi politik. Penelitian ini hendak menjawab dua pertanyaan, yaitu: (1) bagaimana transformasi Nelson Pomalingo dari akademisi menjadi politisi berlangsung; dan (2) mekanisme psikologis, relasional, dan kelembagaan apa yang mendorong sekaligus memungkinkan transformasi tersebut? Kebaruan penelitian terletak pada model mekanisme berlapis yang menghubungkan identitas naratif, kebutuhan sosial, efikasi politik, identitas moral, modal sosial, dan peluang pencalonan. Dalam model ini, capaian profesional tidak langsung menghasilkan kandidasi. Capaian terlebih dahulu ditafsirkan sebagai bukti kelayakan; identitas moral memberi pembenaran atas pencarian pengaruh; jejaring

mengubah reputasi menjadi sumber daya; dan rekrutmen partai membuka peluang kelembagaan. Dengan demikian, transformasi dipahami sebagai kerja identitas yang berlangsung bertahap, bukan akibat satu sifat kepribadian atau satu motif tunggal.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal dan analisis naratif untuk menjelaskan perubahan peran Nelson Pomalingo dari akademisi menjadi politisi dalam konteks karier, organisasi, dan politik lokal Gorontalo. Kasus dipilih secara *purposif* karena informan mencapai jabatan profesor dan rektor, melepaskan status pegawai negeri sipil sebelum usia pensiun, dan berhasil menduduki jabatan politik. Data primer diperoleh melalui empat wawancara mendalam pada 5 Januari, 21 Maret, 16 Juli, dan 1 Agustus 2022 yang menelusuri riwayat karier, pengalaman pencalonan, pertimbangan memasuki partai, penilaian atas kapasitas diri, tanggung jawab moral, konflik politik, dan pembentukan jejaring. Data sekunder berupa dokumen biografis dan kelembagaan digunakan untuk melacak riwayat pendidikan, jabatan akademik, organisasi, pencalonan, dan jabatan publik. Unit analisis berupa episode naratif yang mengandung titik balik karier, alasan memasuki politik, penilaian diri, relasi penentu, dan orientasi tindakan. Analisis dilakukan dengan merekonstruksi kronologi karier; memberi kode awal secara induktif; membandingkan kode antarsesi; mengelompokkannya ke dalam tema capaian dan efikasi, tanggung jawab moral, pengalaman politik yang merugikan, jejaring sosial, rekrutmen partai, dan orientasi kekuasaan; kemudian menafsirkan hubungan antartema secara abduktif. Kredibilitas data diperkuat melalui perbandingan antarsesi wawancara, pemeriksaan konsistensi kronologi dengan dokumen, dan penelusuran narasi yang tidak sepenuhnya mendukung motif pengabdian. Identitas informan dipertahankan karena ia merupakan tokoh publik dan riwayat jabatannya menjadi bagian pokok kasus. Analisis diarahkan pada pemaknaan pengalaman, bukan diagnosis kepribadian atau penilaian atas keunggulan moral dan kinerja pemerintahannya.

Hasil dan Pembahasan

1. Transformasi Sebagai Proses Bertahap

Riwayat Nelson Pomalingo memperlihatkan bahwa transformasi politik tidak berlangsung melalui pemutusan mendadak dari dunia akademik. Karier dimulai sebagai guru, kemudian dilanjutkan sebagai dosen pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sam Ratulangi kampus Gorontalo. Pengalaman struktural berkembang melalui jabatan kepala sekolah, pimpinan perguruan tinggi, ketua tim perubahan status kelembagaan, Rektor IKIP Negeri Gorontalo, Rektor Universitas Negeri Gorontalo, dan Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Jabatan profesor dan pengalaman memimpin perguruan tinggi membentuk modal kultural sekaligus narasi kompetensi. Masuknya Nelson Pomalingo ke politik elektoral dimulai melalui pencalonan sebagai calon Wakil Gubernur Gorontalo dari jalur perseorangan pada 2011. Kekalahan pada pencalonan pertama tidak menghentikan orientasi politik. Evaluasi terhadap pengalaman tersebut menghasilkan persepsi bahwa dukungan partai, persiapan jangka panjang, dan basis sosial diperlukan dalam pilkada langsung. Hal ini sebagaimana disampaikan Nelson Pomalingo:

Yah sebetulnya tahun 2011 itu berusaha memenuhi respon sebagian masyarakat Gorontalo yang mendorong kami maju menjadi calon Gubernur, walaupun lewat jalur perseorangan. Karena saat itu komunikasi dengan beberapa partai politik memang belum mencapai kata sepakat, sehingga alternatifnya adalah harus melalui jalur

perseorangan. Hasil akhir pemilihan memang belum sesuai harapan, tapi kami tidak putus asa karena sebagai orang yang berlatar belakang akademisi tentu saya harus mengevaluasi bagaimana dunia akademisi bisa diadaftasi dengan dunia politik. Dan akhirnya kami berkesimpulan bahwa dalam dunia politik modal sosial harus terus dibangun (Wawancara, 5 Januari 2022).

Tahap berikutnya berlangsung ketika tawaran pencalonan kepala daerah disertai persyaratan untuk menjadi kader partai dan melepaskan status pegawai negeri sipil. Keputusan tersebut menunjukkan pergeseran dari ambisi politik yang masih dapat berdampingan dengan profesi akademik menuju komitmen penuh pada karier politik. Rekrutmen partai berfungsi sebagai pemicu yang mengubah kesiapan psikologis menjadi tindakan pencalonan. Pola ini sejalan dengan kajian kemunculan kandidat yang menempatkan dorongan eksternal dan akses kelembagaan sebagai penghubung antara rasa mampu dan keputusan untuk maju (Fox & Lawless, 2014; Lawless, 2012).

Dengan demikian, transformasi terdiri atas tiga fase: pembentukan kapasitas dan reputasi melalui karier akademik, pengujian ambisi melalui pencalonan awal, serta konsolidasi komitmen melalui partai politik. Urutan ini memperlihatkan bahwa identitas akademisi tidak langsung ditanggalkan. Identitas tersebut justru digunakan sebagai landasan legitimasi bagi identitas politik baru. Transformasi lebih tepat dipahami sebagai perluasan dan penataan ulang identitas profesi daripada penggantian identitas secara total.

2. Capaian Akademik, Efikasi Politik, dan Kebutuhan Berprestasi

Nelson Pomalingo menilai pendidikan doktoral, jabatan profesor, pengalaman sebagai rektor, dan keberhasilan memimpin perubahan kelembagaan sebagai bukti kapasitas pengambilan keputusan. Berdasarkan pengalaman tersebut, keterlibatan langsung dalam pemerintahan dipandang lebih efektif daripada penyampaian gagasan pembangunan dari luar struktur kekuasaan. Menurut Nelson Pomalingo:

Sebagai bagian dari tim yang pernah berjuang untuk menjadikan Gorontalo menjadi Provinsi, dan pernah dipercaya menjadi kepala BAPPEDA Provinsi Gorontalo, sebelum akhirnya dipercaya menjadi Rektor UNG saya dapat membandingkan bagaimana dunia akademisi dan dunia birokrasi. Dunia akademisi memang sebatas memberi rekomendasi kepada pemerintah daerah atas hasil kajian yang dilakukan, tetapi Keputusan akhirnya tetap ada pada pihak pemerintah daerah dengan berbagai pertimbangan. Jadi akademisi tidak punya otoritas untuk mengubah kajian menjadi kebijakan. Nah saya masuk politik ini memiliki misi mengeksekusi kebijakan pemerintah berbasis kajian dari perguruan tinggi (Wawancara, 21 Maret 2022).

Penilaian tersebut menunjukkan hubungan antara rekam prestasi dan efikasi politik internal. Keberhasilan pada domain akademik diproyeksikan ke domain politik sehingga muncul keyakinan bahwa persoalan pemerintahan dapat ditangani secara cepat, rasional, dan berbasis pengetahuan. Dalam literatur ambisi politik, persepsi bahwa diri berkualifikasi merupakan prediktor penting bagi kesediaan menjadi kandidat (Dynes et al., 2024; Fox & Lawless, 2014). Namun, keyakinan tersebut tetap merupakan penilaian subjektif yang dapat mengandung bias atribusi diri. Literatur psikologi politik membedakan rasa mampu yang adaptif dari pencarian status yang defensif, sehingga klaim kompetensi perlu dibaca secara kritis (Cichocka et al., 2024). Prestasi masa lalu memberi dasar psikologis bagi rasa mampu, tetapi tidak otomatis menjamin efektivitas dalam arena politik yang memiliki logika berbeda.

Kebutuhan berprestasi tampak pada kecenderungan menetapkan sasaran kelembagaan yang menantang dan menghubungkan keberhasilan masa lalu dengan sasaran

politik berikutnya. Dalam kerangka McClelland (1987) kebutuhan berprestasi mendorong pencarian hasil yang dapat dinilai dan tanggung jawab personal atas pencapaiannya (Susanto & Lestari, 2018). Pada kasus ini, jabatan kepala daerah dipersepsikan sebagai arena yang memungkinkan dampak lebih luas dan terukur. Peralihan politik karenanya tidak hanya didorong ketidakpuasan terhadap respons pemerintah, tetapi juga oleh kebutuhan untuk menguji kompetensi pada medan yang lebih luas.

Temuan tersebut memperluas kajian tentang nilai dan kemunculan kandidat. Weinberg (2021) menunjukkan bahwa nilai pribadi dan karakter psikologis berhubungan dengan kesediaan mencalonkan diri. Kasus Nelson Pomalingo menambahkan mekanisme naratif: capaian profesional dipilih sebagai bukti kelayakan, kemudian dirangkai menjadi alasan untuk mencari otoritas publik. Prestasi bukan hanya sumber reputasi eksternal, tetapi juga sumber keyakinan internal untuk menanggung risiko politik.

3. Tanggung Jawab Moral dan Legitimasi atas Orientasi Kekuasaan

Motif pengabdian menempati posisi sentral dalam narasi transformasi. Keterlibatan dalam presidium pembentukan Provinsi Gorontalo membentuk rasa tanggung jawab terhadap arah pembangunan daerah. Ketika capaian pembangunan dinilai belum memadai, keterlibatan langsung dalam pemerintahan dipandang sebagai kelanjutan tanggung jawab akademik dan historis. Hal ini menurut Nelson Pomalingo:

Sesuai pengamatan saya selama mengabdikan di perguruan tinggi, saya melihat ada kelemahan sistem pengambilan kebijakan pembangunan yang jamak terjadi di lingkup pemerintahan selama ini. Beberapa aspek yang menurut saya perlu diperbaiki seperti kebijakan masih ada yang terkesan berbasis proyek, belum sepenuhnya sadar akan pemanfaatan hasil-hasil riset, dan pengambilan Keputusan yang terkesan lambat (Wawancara, 1 Agustus 2022).

Narasi tersebut memperlihatkan peran identitas moral. Identitas akademisi tidak hanya dipahami sebagai kepemilikan pengetahuan, tetapi juga sebagai kewajiban menggunakan pengetahuan untuk kepentingan masyarakat. Ketika nilai moral menjadi bagian sentral dari konsepsi diri, tujuan politik dapat dipersepsikan sebagai bentuk konsistensi identitas, bukan penyimpangan darinya (Han et al., 2021). Orientasi pada jabatan kemudian memperoleh legitimasi melalui tujuan pelayanan publik. Meskipun demikian, motif moral dan kebutuhan berkuasa tidak perlu diposisikan sebagai dua hal yang saling meniadakan. Kebutuhan berkuasa dapat bersifat personal ketika diarahkan pada status dan dominasi, atau tersosialisasi ketika diarahkan pada pengaruh untuk mencapai tujuan kolektif (McClelland, 1987). Pada kasus ini, kekuasaan dinarasikan sebagai sarana meningkatkan daya guna pengetahuan dan mempercepat keputusan. Penjelasan tersebut dekat dengan gagasan motivasi pelayanan publik yang menempatkan ketertarikan pada pembuatan kebijakan, komitmen pada kepentingan publik, dan pengorbanan diri sebagai sumber tindakan pelayanan (Perry & Wise, 1990; Perry et al., 2010).

Analisis kritis tetap diperlukan karena narasi pengabdian juga berfungsi sebagai pembenaran diri. Kisah hidup politik cenderung disusun agar pilihan masa lalu tampak konsisten dengan nilai yang diyakini saat ini. Karena data utama berasal dari ingatan retrospektif, motif moral tidak dapat diperlakukan sebagai sebab tunggal yang sepenuhnya objektif. Kontribusi pentingnya justru terletak pada fungsi psikologis narasi tersebut: orientasi kekuasaan dapat diterima oleh diri sendiri dan publik ketika ditempatkan dalam kesinambungan pengabdian akademik.

4. Pengalaman Politik Yang Merugikan dan Pembentukan Misi Korektif

Pengalaman menghadapi dugaan rekayasa politik menjadi titik penting lain dalam narasi. Nelson Pomalingo menghubungkan konflik yang pernah dialami saat memimpin perguruan tinggi dengan persepsi mengenai praktik politik yang mengabaikan etika. Putusan bebas dalam perkara yang pernah dihadapi dimaknai sebagai penguatan keyakinan bahwa tindakan politik tertentu telah merugikan secara tidak adil. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Nelson Pomalingo:

Saat masih menjabat sebagai rektor saya pernah menghadapi proses hukum, tapi waktu itu saya dengan penuh keyakinan bahwa kebijakan yang saya ambil tidak ada masalah, dan akhirnya hasil putusan pengadilan menyatakan saya bebas dari tuntutan hukum (Wawancara, 16 Juli 2022).

Pengalaman tersebut tidak hanya menghasilkan penolakan terhadap politik. Sebaliknya, pengalaman dirumuskan sebagai alasan untuk memasuki arena politik dan membawa gagasan politik pencerahan. Perubahan makna ini penting secara psikologis. Peristiwa yang awalnya menempatkan individu sebagai objek kekuasaan direkonstruksi menjadi sumber agensi untuk memengaruhi cara kekuasaan dijalankan. Transformasi demikian menunjukkan bahwa emosi moral, rasa ketidakadilan, dan kebutuhan memulihkan kendali dapat menyatu dengan ambisi politik. Gagasan politik pencerahan diwujudkan dalam penekanan pada dialog, argumentasi rasional, dan penggunaan kajian akademik dalam kebijakan. Perspektif tersebut konsisten dengan identitas akademik yang dibawa ke arena politik. Namun, klaim pembeda moral antara akademisi-politisi dan politisi lain tidak dapat diterima tanpa evaluasi kinerja dan persepsi pemangku kepentingan. Data penelitian hanya memungkinkan kesimpulan mengenai cara pengalaman tersebut dimaknai oleh informan, bukan mengenai keunggulan moral atau efektivitas pemerintahannya. Penekanan ini relevan dengan temuan bahwa pejabat politik melakukan seleksi terhadap informasi yang tersedia; karena itu, latar akademik baru bermakna apabila disertai kebiasaan memberi perhatian pada bukti yang beragam, bukan hanya bukti yang menguatkan posisi sendiri (Senninger et al., 2024).

5. Afiliasi, Modal Sosial, dan Kelayakan Elektoral

Jejaring organisasi merupakan sumber daya penting dalam transformasi politik Nelson Pomalingo. Kepemimpinan pada organisasi profesi, keagamaan, petani, cendekiawan, kependudukan, dan kerja sama perguruan tinggi memperluas hubungan dengan kelompok sosial yang beragam. Jejaring alumni dan guru juga dipersepsikan menyediakan pengenalan personal hingga tingkat akar rumput. Hal ini sebagaimana menurut Nelson Pomalingo:

Saya mencoba ingin merubah persepsi banyak orang bahwa pertarungan politik itu harus menyiapkan modal finansial yang cukup. Sebagai orang yang pernah memimpin kampus terbesar di Gorontalo, tentu telah melahirkan banyak alumni yang tersebar diberbagai pelosok Gorontalo ini, apalagi kampus UNG banyak melahirkan guru, dan saya pernah menjadi ketua PGRI Provinsi Gorontalo, serta memegang berbagai organisasi sosial kemasyarakatan. Kenapa tidak modal social ini saya kapitalisasi menjadi modal politik (Wawancara, 16 Juli 2022).

Dalam kerangka kebutuhan berafiliasi, keterlibatan organisasi memberi pemenuhan relasional berupa penerimaan, kedekatan, dan rasa menjadi bagian dari kelompok. Dalam kerangka modal sosial, relasi yang berulang menghasilkan akses, kepercayaan, dan kapasitas mobilisasi (Portes, 1998; Putnam, 1995). Kedua penjelasan tersebut saling melengkapi.

Kebutuhan afiliasi menjelaskan dorongan membangun hubungan, sedangkan modal sosial menjelaskan manfaat politik yang dapat diperoleh dari hubungan tersebut. Modal sosial juga meningkatkan kelayakan elektoral yang dipersepsikan. Keputusan mencalonkan diri menjadi lebih rasional ketika basis pengenalan, kanal komunikasi, dan dukungan organisasi dinilai telah tersedia.

Temuan ini menegaskan bahwa efikasi politik tidak berdiri sendiri. Rasa mampu memperoleh konsekuensi tindakan ketika disertai jaringan dan akses partai. Rekrutmen partai menyediakan kendaraan formal, sedangkan modal sosial menyediakan perkiraan basis dukungan. Penggunaan jejaring tetap memiliki ambivalensi demokratis. Hubungan sosial dapat memperluas partisipasi dan kepercayaan, tetapi dapat pula direduksi menjadi instrumen mobilisasi personal. Karena itu, keberadaan jaringan tidak dapat langsung disamakan dengan kualitas demokrasi. Penilaian normatif memerlukan bukti mengenai keterbukaan jaringan, akuntabilitas, serta kemampuan mengubah dukungan personal menjadi kebijakan publik yang inklusif.

6. Sintesis Mekanisme Transformasi Politik

Keseluruhan temuan membentuk lima mekanisme yang saling berurutan tetapi tidak sepenuhnya linear. Pertama, capaian akademik dan manajerial menghasilkan reputasi eksternal sekaligus efikasi politik internal. Kedua, identitas moral menafsirkan pencarian otoritas sebagai kelanjutan pengabdian, sehingga mengurangi ketegangan antara citra akademisi dan tuntutan politisi. Ketiga, pengalaman politik yang dipersepsikan merugikan direkonstruksi menjadi misi korektif dan pemulihan agensi. Keempat, afiliasi organisasi mengakumulasi modal sosial yang meningkatkan perkiraan dukungan.

Kelima, rekrutmen partai mengonversi kesiapan psikologis dan sumber daya relasional menjadi peluang pencalonan yang nyata. Mekanisme ini dapat diringkas sebagai rangkaian dari: prestasi-efikasi, moralitas-legitimasi, pengalaman-agensi, afiliasi-mobilisasi, dan rekrutmen-kandidasi. Dalam mekanisme tersebut, kebutuhan berprestasi dan berafiliasi diarahkan menuju kebutuhan akan pengaruh. Orientasi kekuasaan tidak muncul sebagai motif terisolasi, tetapi sebagai titik temu antara rasa mampu, tujuan moral, pengalaman ketidakadilan, dan kelayakan elektoral. Model ini menjelaskan mengapa transformasi tidak terjadi pada setiap akademisi yang memiliki reputasi tinggi.

Peralihan memerlukan kombinasi antara disposisi psikologis, narasi identitas, sumber daya jaringan, dan kesempatan kelembagaan. Temuan juga mengoreksi anggapan bahwa akademisi yang memasuki politik sepenuhnya meninggalkan identitas lamanya. Pada kasus Nelson Pomalingo, identitas akademik digunakan sebagai modal kultural, sumber efikasi, dan kerangka moral bagi identitas politisi. Akan tetapi, integrasi identitas tersebut tetap mengandung risiko. Rasionalitas ilmiah dapat berbenturan dengan tuntutan loyalitas partai dan kalkulasi elektoral. Karena itu, keberhasilan transformasi tidak cukup diukur dari kemenangan pemilu, tetapi perlu dinilai dari konsistensi penggunaan bukti, keterbukaan pada kritik, dan akuntabilitas kebijakan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi Nelson Pomalingo dari akademisi menjadi politisi berlangsung secara bertahap, bukan sebagai perpindahan profesi yang tiba-tiba. Prosesnya dimulai dari pembentukan reputasi dan kapasitas melalui karier akademik, dilanjutkan dengan pencalonan awal dan evaluasi atas kekalahan, diperkuat oleh akumulasi jejaring organisasi, lalu dikonsolidasikan melalui rekrutmen partai dan pelepasan status

pegawai negeri sipil. Mekanisme yang mendorong dan memungkinkan transformasi tersebut merupakan hubungan antara kebutuhan berprestasi, berpengaruh, dan berafiliasi; efikasi politik yang tumbuh dari keberhasilan akademik dan manajerial; identitas moral yang memaknai kekuasaan sebagai sarana pengabdian; pengalaman ketidakadilan yang direkonstruksi menjadi misi korektif; modal sosial yang menyediakan basis dukungan; serta partai politik yang membuka akses pencalonan. Dengan demikian, identitas akademik tidak hilang, tetapi ditata ulang menjadi sumber kompetensi, legitimasi moral, dan modal politik. Temuan ini memperlihatkan bahwa ambisi politik akademisi tidak dapat dijelaskan oleh satu motif, melainkan oleh pertemuan antara narasi diri, sumber daya relasional, dan peluang kelembagaan. Karena penelitian bertumpu pada satu informan dan ingatan retrospektif, hasilnya tidak dapat digeneralisasi kepada seluruh akademisi-politisi; penelitian berikutnya perlu menggunakan desain multi-kasus, melibatkan kolega, elite partai, dan pemilih, serta menilai apakah kebiasaan menggunakan bukti dan keterbukaan terhadap kritik tetap bertahan setelah jabatan politik diperoleh.

Daftar Pustaka

- Ammassari, S., McDonnell, D., & Valbruzzi, M. (2023). It's About The Type Of Career: The Political Ambition Gender Gap Among Youth Wing Members. *European Journal of Political Research*, 62(3), 989-1010.
- Blais, J., Pruyssers, S., & Chen, P. G. (2019). Why Do They Run? The Psychological Underpinnings Of Political Ambition. *Canadian Journal of Political Science/Revue Canadienne De Science Politique*, 52(4), 761-779.
- Cichocka, A., Marchlewska, M., & Cislak, A. (2024). Self-Worth And Politics: The Distinctive Roles Of Self-Esteem And Narcissism. *Political Psychology*, 45(1), 43-85.
- Dynes, A. M., Hassell, H. J. G., & Miles, M. R. (2024). She Said Yes! An Exploration Of Confidence Among Women Candidates Running For Elected Office. *State and Local Government Review*, 56(3), 169-181.
- Fox, R. L., & Lawless, J. L. (2014). Uncovering The Origins Of The Gender Gap In Political Ambition. *American Political Science Review*, 108(3), 499-519.
- Fox, R. L., & Lawless, J. L. (2024). The Invincible Gender Gap In Political Ambition. *PS: Political Science & Politics*, 57(2), 212-218.
- Han, H., Ballard, P. J., & Choi, Y. J. (2021). Links Between Moral Identity And Political Purpose During Emerging Adulthood. *Journal of Moral Education*, 50(2), 166-184.
- Lawless, J. L. (2012). *Becoming A Candidate: Political Ambition And The Decision To Run For Office*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mashuri, A., Putra, I. E., & Montiel, C. J. (2022). Political Psychology Of Southeast Asia. *Journal of Social and Political Psychology*, 10(2), 491-500.
- McAdams, D. P., & McLean, K. C. (2013). Narrative Identity. *Current Directions in Psychological Science*, 22(3), 233-238.
- McClelland, D. C. (1987). *Human Motivation*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mikhriani, M. (2008). Manajemen Diri Dan Kajian Psikologi: Perspektif Tiga Motif Sosial David McClelland. *Jurnal MD*, 1(1), 11-32.
- Perry, J. L., & Wise, L. R. (1990). The Motivational Bases Of Public Service. *Public Administration Review*, 50(3), 367-373.

- Perry, J. L., Hondeghem, A., & Wise, L. R. (2010). Revisiting The Motivational Bases Of Public Service: Twenty Years Of Research And An Agenda For The Future. *Public Administration Review*, 70(5), 681-690.
- Portes, A. (1998). Social Capital: Its Origins And Applications In Modern Sociology. *Annual Review of Sociology*, 24(1), 1-24.
- Putnam, R. D. (1995). Bowling Alone: America's Declining Social Capital. *Journal of Democracy*, 6(1), 65-78.
- Riessman, C. K. (2008). *Narrative Methods For The Human Sciences*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Senninger, R., Bischof, D., & Wüest, B. (2024). Which Information Do Politicians Pay Attention To? Evidence From A Field Experiment And Interviews. *British Journal of Political Science*, 54(3), 771-793.
- Susanto, N. H., & Lestari, C. (2018). Mengurai Problematika Pendidikan Nasional Berbasis Teori Motivasi Abraham Maslow dan David McClelland. *Lembaran Ilmu Kependidikan*, 47(1), 30-39.
- Weinberg, J. (2021). Who Wants To Be A Politician? Basic Human Values And Candidate Emergence In The United Kingdom. *British Journal of Political Science*, 51(4), 1565-1581.